

**JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL ACTIONS ON  
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) ( DECISION STUDY NUMBER  
438/PID.SUS/PN.JKT.UTR )**

**Abstract**

Number of complaints and violations by financial service providers in the Financial Technology (Fintech) business, in particular violent extortion. This research is included in normative legal research using secondary sources. Secondary sources of material include primary legal materials. Secondary legal materials come from library research, namely through textbooks, legal dictionaries, legal journals and reviews of debt collector crimes, especially in the Financial Technology (Fintech) business. The legal material analysis technique then uses qualitative descriptive techniques. Based on the results of research and discussion, it can be said that the actions of the debt collector DEDE SUPARDI in collecting customers and disturbing customers who are perpetrators of criminal acts of extortion and threats by distributing data from criminal law examinations are Financial Technology (Fintech) crimes that can be found in the Criminal Code. And based on the considerations, those articles are Article 45(4) of the Criminal Code and Article 335(1) of the Criminal Code, Article 406 of the Criminal Code, Article 27(1) of the ITE Law, Articles 368 and 369 of the Criminal Code. can be internal or external factors, can be a lack of legal knowledge of the debtor, or the company's request to creditors. Judges are reliable and the last stop for justice seekers in the judicial process. As one of the powers of the judiciary to receive, examine and hear cases, judges need to seek justice for those who seek justice. they are not based solely on statutory provisions. Judges are required to make legal discoveries under certain conditions, in order to guide judges to judge cases fairly and wisely in criminal cases in *Financial Technology (Fintech)*.

Keywords: *Financial Technology (Fintech), criminal acts, judges' considerations*

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PADA FINANCIAL TECNOLOGY (FINTECH) ( STUDI  
PUTUSAN NOMOR438/PID.SUS/PN.JKT.UTR )**

**Abstrak**

Jumlah pengaduan dan pelanggaran oleh penyedia jasa keuangan dalam bisnis *Financial Technology (Fintech)*, khususnya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber sekunder. Sumber bahan sekunder meliputi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari penelitian kepustakaan, yaitu melalui buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan review kejahatan debt collector khususnya dalam bisnis *Financial Technology (Fintech)*. Teknik analisis bahan hukum kemudian menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tindakan *debt collector* terdakwa DEDE SUPARDI dalam menagih nasabah dan mengganggu nasabah pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan cara menyebarluaskan data pribadi dari pemeriksaan hukum pidana merupakan kejahatan *Financial Technology (Fintech)* yang dapat dituntut dalam KUHP. Dan atas pertimbangan hakim berdasarkan Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 45(4) KUHP dan, Pasal KHUP 335(1), Pasal 406 KUHP, UU ITE Pasal 27(1), KHUP Pasal 368 dan 369. Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan ini dapat berupa faktor internal maupun eksternal, dapat berupa kurangnya pengetahuan hukum debitur, atau permintaan perusahaan kepada kreditur. Hakim adalah andalan dan perhentian terakhir para pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu unsur kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara, hakim perlu mencari keadilan bagi mereka yang mencari keadilan. mereka tidak hanya Berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hakim wajib melakukan penemuan hukum dalam kondisi tertentu, guna membimbing hakim untuk mengadili perkara secara adil dan bijaksana dalam perkara pidana di *Financial Technology (Fintech)*

Kata Kunci : *Financial Technology (Fintech)*, *tindak pidana*, *pertimbangan hakim*